BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dan Problematika Yang Lahir Dari Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sering dijuluki makhluk sosial, dalam bermasyarakat manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga adanya hal tersebut menimbulkan hubungan timbal balik maupun komunikasi antar sesama manusia yang menciptakan kerja sama atau hingga menghasilkan hal tertentu yang mereka harapkan dari adanya interaksi maupun komunikasi yang dilakukan. Salah satu hasil dari interaksi manusia yaitu adanya saling ketertarikan dari sesama manusia atau dua insan manusia yaitu seorang lelaki dan perempuan sehingga menciptakan adanya harapan atau keinginan untuk hidup bersama dengan mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang diharap kedua belah pihak terlebih dulu harus melaksanakan perkawinan yang disetujui oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan lahir batin antara pasangan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan keturunan yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila hendak melangsungkan perkawinan tentu perlu adanya beberapa hal atau persyaratan yang harus dan wajib dipenuhi seperti halnya yang telah tertera dalam syarat perkawinan pada

ketentuan UU Perkawinan Tahun 1974. Pada Syarat perkawinan ini mencakup adanya syarat formil dan materiil, syarat formil yaitu adanya aturan atau prosedur dalam melangsungkan perkawinan berlandaskan pada hukum yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon, dapat juga disebut sebagai syarat objektif sedangkan untuk syarat materiil yaitu sebuah syarat yang antara pihak yang ingin melakukan perkawinan tersebut atau pada calon mempelai yang dapat disebut dengan syarat subyektif.

Mengenai batas minimal usia dari calon mempelai lelaki maupun perempuan merupakan salah satu dari syarat agar dapat melangsungkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan Tahun 1974 dan sudah pasti diperuntukkan untuk calon mempelai lelaki maupun perempuan. Dengan adanya syarat ini memiliki tujuan untuk membatasi atau mengurangi angka perkawinan anak yang ada di wilayah Indonesia salah satunya berada di wilayah Magetan. Perkawinan dibawah umur sudah dibenarkan sebagai salah satu bentuk praktik sosial budaya yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan sangatlah berbahaya bagi seluruh warga Indonesia khususnya generasi penerus bangsa yang akan mendatang yang menimbulkan adanya sebab penyebab dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).⁴⁷

⁴⁷ Raden Maestro Broto Ariyo, Yunanto Yunanto, and Herni Widanarti, "PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERKAIT DENGAN BATAS UMUR PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

Adanya syarat perkawinan mengenai batas minimal umur yang senyatanya tidak berlaku secara mutlak karena di Indonesia pada prakteknya hal ini dapat disimpangi dengan adanya dispensasi nikah. Mengenai dispensasi nikah, bahwa dispensasi nikah adalah sebuah bentuk pengkhususan dari aturan umum diperuntukkan untuk suatu keadaan tertentu, seperti pemberian izin agar tidak melakukan sebuah larangan tersebut dimana terdapat adanya pengecualian perbuatan sesuai yang disampaikan hukum bahwa peraturan perundang – undangan tidak berlaku apabila untuk suatu hal yang khusus seperti halnya dispensasi nikah tersebut.⁴⁸

Pengertian mengenai dispensasi nikah merupakan sebuah bentuk upaya hukum yang dilakukan pemohon agar memperoleh izin untuk melangsungkan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur belum mencapai batas minimal usia yang sudah ditetapkan oleh Undang – Undang. Dalam pengajuan dispensasi nikah tidak hanya merujuk pada calon mempelai dibawah umur yang menyimpang dari UU Perkawinan Tahun 1974 yang diantaranya yaitu sebagai berikut :⁴⁹

1. Perkawinan hanya di izinkan atau diperbolehkan apabila calon mempelai lelaki maupun perempuan telah berumur 19 tahun berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 2019.

⁴⁸ Dwi Idayanti, “Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu),” *Lex Privatum* 2, no. 2 (2014).

⁴⁹ Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Jika terdapat adanya penyimpangan pada aturan umur sebagaimana yang telah dimaksud point 1, bahwa orang tua lelaki maupun perempuan bisa mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama maupun Negeri menggunakan alasan mendesak beserta berbagai bukti terlampir
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sesuai pada point 2, harus mencermati dan memperhatikan tanggapan dari kedua calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan.
4. Terkait beberapa aturan terhadap kondisi seorang atau orang tua calon pengantin sesuai Pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga aturan terkait permohonan dispensasi pada ayat (2) dengan tidak mengurangi aturan dalam Pasal 6 ayat (6). Izin yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ialah izin Pengadilan Agama berkaitan dengan usia calon pasangan, maka jika usia mempelai pengantin belum sebanding dengan aturan pada peraturan perundang – undangan maka harus memperoleh izin kedua orang tua terlebih dulu.

Menurut Siti Marfu'ah selaku panitera Pengadilan Agama Magetan, menyampaikan bahwa, adanya perubahan batas usia minimal melangsungkan pernikahan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan Tahun 1974 adalah salah satu alasan terjadinya lonjakan yang termasuk tinggi di Kabupaten Magetan.⁵⁰

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Siti Marfu'ah S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan.

Adanya pengajuan dispensasi nikah yang dilakukan oleh masyarakat Magetan dari kurun waktu 2019 hingga 2023, berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan panitera Pengadilan Agama Magetan, bahwa memang betul banyak sebagian masyarakat mengajukan permohonan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Magetan, puncak tingginya pengajuan permohonan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Magetan yaitu pada saat pandemic Covid-19 tahun 2020, pada tahun 2020 banyak sekali masyarakat melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan dengan alasan mendesak.⁵¹

Namun tidak semua pengajuan permohonan dispensasi nikah dengan mudah memperoleh izin dari Pengadilan Agama Magetan, juga terdapat adanya pertimbangan yang ada sehingga hakim mengizinkan perkawinan di bawah umur ada pada masyarakat wilayah Pengadilan Agama Magetan, Menurut Nurul Fauziyah selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, menyampaikan bahwa prosedur dari pengajuan serta pelaksanaan dispensasi nikah yang berada di Pengadilan Agama Magetan merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai bentuk pedoman dan landasan hakim serta petunjuk dalam mempertimbangkan pemberian putusan terkait perizinan pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan pihak pemohon baik dari orang tua sebagai wali dari calon pengantin yang masih di bawah umur.⁵²

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Siti Marfu'ah S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan.

⁵² Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

Terdapat adanya problematika yang dialami masyarakat sebagai pemohon sehingga pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagai bentuk penyelesaian problematika tersebut dengan mengikuti prosedur pelaksanaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan. Yangmana pelaksanaan dan problematika yang lahir dari pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan yaitu:

1. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan

Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan terdapat adanya persyaratan administrasi dari pengajuan dispensasi nikah sebagai berikut :⁵³

- a. Syarat Administrasi Syarat administrasi mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan sesuai :
 - 1) Surat permohonan
 - 2) Asli dan fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari KUA
 - 3) Fotokopi KTP suami dan istri (orang tua dua anak)
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua anak
 - 5) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kupitan Akta Nikah
 - 6) Fotokopi KTP calon suami dan calon isteri

⁵³ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- 7) Fotokopi Akta Kelahiran Calon Suami dan Calon Isteri
- 8) Fotokopi Ijasah terakhir Calon Suami dan Calon Isteri
- 9) Fotokopi Hasil USG dari Dokter Kandungan
- 10) Fotokopi hasil konseling tentang reproduksi beserta surat keterangan sehat calon isteri dari puskesmas setempat
- 11) Asli formulir hasil konseling dari kantor BKKBN/ P2T P2A di Magetan
- 12) Fotokopi surat keterangan penghasilan apabila calon suami sudah bekerja dari desa atau instansi tempat bekerja
- 13) Fotokopi surat kematian apabila orang tua ada yang sudah meninggal
- 14) Membayar panjar biaya perkara (berdasarkan SK Radius Ketua Pengadilan Agama Magetan)

Sedangkan pada Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Surat permohonan
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran anak

⁵⁴ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran calon suami/istri
 - 6) Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- b. Pengajuan Permohonan dispensasi nikah berdasarkan pada Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu :⁵⁵
- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah ialah orang tua maupun wali dari anak belum cukup umur tersebut sebagai calon mempelai
 - 2) Dalam hal ini orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi nikah tetap diajukan oleh orang tua, atau salah satu orang tua yang mempunyai hak kuasa asuh atas anak sesuai putusan pengadilan
 - 3) Apabila salah satu orang tua meninggal dunia maupun tidak diketahui keberadaanya, maka wali yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut
 - 4) Dan apabila orang tua tidak hadir, maka diajukan oleh pihak kuasa belandaskan dengan surat kuasa dari orang tua atau wali yang sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan.
 - 5) Jika ada antara anak dengan orang tua atau walinya memiliki perbedaan agama pada saat mengajukan dispensasi nikah,

⁵⁵ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

maka tetap permohonan dispensasi nikah diajukan ke perbedaan agama antara anak dengan orang tua atau walinya pada saat mengajukan dispensasi nikah, maka permohonan dispensasi nikah diajukan ke lembaga Pengadilan sesuai dengan agama dari anak. Sesuai pada ketentuan dalam pasal 7 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, bahwa apabila ketentuan administrasi pengajuan permohonan dispensasi nikah tidak dilengkapi, maka panitera akan mengembalikan berkas persyaratan administrasi tersebut kepada pemohon dan menghimbau untuk segera dilengkapi kembali.⁵⁶ Dengan demikian apabila persyaratan mengenai prosedur dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah tidak dilengkapi, hakim juga tidak memproses permohonan dispensasi nikah sehingga pemohon diwajibkan untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai yang telah disampaikan pihak petugas sistem layanan informasi Pengadilan Agama Magetan.

Menurut Nurul Fauziah selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Magetan, menyatakan bahwa adanya persyaratan yang telah tertera pada Pasal 5 ayat (1), (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut ialah sebuah persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh pemohon sedangkan mengenai perihal pengabulan dispensasi nikah tersebut hakim perlu

⁵⁶ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

menelaah secara mendalam serta rinci lagi karena hakim juga perlu mengetahui adanya alasan yang sesuai fakta mengapa adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan.⁵⁷ Sebagaimana yang telah kita pahami bersama semua pengajuan dispensasi nikah jelas karena umur yang belum cukup, namun hakim disini menjelaskan bahwa pertimbangan untuk pengabulan bukan hanya sebatas tidak cukup umurnya mempelai, namun juga harus disertai alasan logis, kuat dan bahkan mendesak jika perlu agar pengajuan dispensasi dapat diproses dan dikabulkan.⁵⁸

Apabila semua persyaratan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah dipenuhi dari pihak pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang, proses pelaksanaan selanjutnya berlandaskan pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) PERMA No 5 Tahun 2019, panitera akan memeriksa persyaratan administrasi tersebut jika terdapat syarat – syarat administrasi dari permohonan dispensasi nikah tidak dilengkapi, maka panitera akan mengembalikan data persyaratan administrasi tersebut untuk segera dilengkapi oleh pihak pemohon agar dapat segera diproses lebih lanjut.

Sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) dan (5) PERMA No 5 Tahun 2019, apabila persyaratan administrasi permohonan dispensasi nikah tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, maka permohonan dispensasi nikah di daftarkan dalam buku register, setelah membayar panjar biaya perkara.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁵⁸ *Ibid.*

Namun jika pemohon tidak sanggup untuk membayar panjar biaya perkara, maka pihak pemohon bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah secara cuma – cuma (*prodeo*). Kemudian pada proses pemeriksaan perkara dalam pemeriksaan perkara pada sidang pertama, Sesuai pda Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, para pihak yang diwajibkan hadir yaitu .⁵⁹

- a. Pemohon (orang tua atau wali dari anak di bawah umur)
- b. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi nikah
- c. Kedua calon mempelai
- d. Kedua orang tua atau wali calon mempelai suami dan isteri/wali calon kedua mempelai suami isteri
- e. Saksi dari kedua calon mempelai suami isteri

Berdasarkan pada Pasal 10 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sidang pertama yaitu pemanggilan pemohon yang diwajibkan untuk hadir, apabila sidang pertama pemohon tidak bisa datang maka persidangan tersebut akan ditunda lanjut untuk persidangan kedua jika pemohon tetap tidak mendatangkan pihak – pihak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di persidangan, maka hakim akan menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan para pihak tersebut.⁶⁰ Terakhir untuk sidang yang ketiga apabila pihak pemohon tidak menghadirkan pihak – pihak yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka permohonan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁶⁰ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

dispensasi nikah dinyatakan gugur dan tidak diterima, namun apabila dari awal sidang pemohon sudah hadir maka sidang dapat dilanjutkan.

Pada perkara mengadili permohonan dispensasi nikah yaitu hakim yang telah mempunyai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang dianggap sebagai hakim anak, dengan adanya mengikuti berbagai pelatihan serta bimbingan terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Persidangan hakim perlu menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami oleh anak agar anak tidak merasa tertekan, takut, sehingga dapat dengan mudah leluasa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, sesuai pada Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, di dalam persidangan hakim juga diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak sebagai calon mempelai suami dan isteri, dan orang tua dari kedua belah pihak orang tua dari calon mempelai.⁶¹ Hal ini bertujuan agar hakim dapat memastikan bahwa orang tua pihak calon mempelai, anak, calon mempelai suami dan isteri, agar dapat mengerti serta paham terkait adanya resiko atau problematika perkawinan.

Terdapat beberapa resiko atau problematika yang kemungkinan muncul setelah perkawinan yang berkenaan dengan :⁶²

- a. Adanya kemungkinan berhenti sekolah bagi anak

⁶¹ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁶² Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Mageta

- b. Adanya juga keberpanjangan anak menempuh wajib belajar 12 tahun
- c. Terkait ketidaksiapan mengenai organ reproduksi anak karena masih usia dini atau dibawah umur
- d. Timbulnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang akan dialami oleh calon pengantin dibawah umur
- e. Kemungkinan timbul adanya perselisihan hingga kekerasan dalam rumah tangga
- f. Dan hingga puncaknya dapat berpotensi adanya perceraian dini

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, bahwa hakim memberikan nasehat kepada kedua belah pihak antara dari pihak kedua orang tua, calon mempelai adalah kewajiban hakim yang harus dilaksanakan di dalam persidangan perkara dispensasi nikah tersebut sebagai bentuk bahan pertimbangan dalam penetapan, apabila hakim tidak memberikan nasehat maka dapat menyebabkan penetapan batal demi hukum.⁶³ Tidak hanya menasehati namun hakim juga perlu mendengarkan keterangan dari para pihak yang ada di dalam persidangan tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Apabila dalam persidangan hakim tidak mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara menyebabkan penetapan dapat batal demi hukum. Menurut Nurul Fauziyah selaku hakim Pengadilan Agama Magetan,

⁶³ Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

menegaskan bahwa keterangan dari semua para pihak yang telah disampaikan dalam persidangan tersebut sangat penting bagi hakim karena keterangan itu yang akan dijadikan juga sebagai bentuk landasan pertimbangan hakim terkait pemberian penetapan putusan perkara dispensasi nikah terkait pemberian izin dispensasi nikah atau tidak diberikannya izin dispensasi nikah tersebut pada kedua calon mempelai mengenai adanya pernikahan anak yang menyimpang pada aturan hukum Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 2019 terkait batas minimum umur untuk melangsungkan pernikahan bagi lelaki maupun perempuan.⁶⁴

2. Problematika dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan

Adanya problematika muncul dari pihak pemohon, yangmana pemohon merasa bahwa problematika tersebut harus cepat diselesaikan agar cepat terselesaikan problematika tersebut dengan baik. Masih terdapat sebagian besar masyarakat, salah satunya masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Magetan beranggapan bahwa untuk menyelesaikan problematika tersebut dengan melalui permohonan dispensasi nikah adalah suatu solusi yang terbaik bagi pemohon dan bagi anak, sehingga mendorong masyarakat sebagai agar mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan menggunakan alasan mendesak agar

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

memperoleh izin untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan di bawah umur tersebut.⁶⁵

Menurut Nurul Fauziyah selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, menyatakan bahwa terdapat adanya beberapa faktor atau alasan yang mendesak yang dialami oleh pihak pemohon sehingga mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat memperoleh izin melangsungkan perkawinan anak tersebut yaitu:⁶⁶

a. Hamil di luar nikah

Banyak masyarakat Indonesia kurang mengerti serta memahami terkait kesehatan reproduksi sehingga banyak masyarakat juga memiliki kebebasan dalam pergaulan dan pengawasan dari orang tua sehingga menimbulkan adanya perbuatan seks. Perbuatan seks bebas dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi masyarakat namun karena kurangnya pemahaman terkait kesehatan reproduksi sehingga sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perbuatan seks bebas tersebut adalah suatu hal yang lazim.

Namun apabila perbuatan seks bebas tersebut telah mengakibatkan adanya hamil di luar nikah maka masyarakat baru menyesali perbuatan tersebut dan merasa bahwa perbuatan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁶⁶ *Ibid.*

tersebut harus ditutupi karena merasa malu. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang khususnya orang tua menganggap bahwa apabila mengetahui anaknya hamil di luar nikah ialah suatu bentuk aib keluarga sehingga mereka memilih menikahkan anaknya dengan yang menghamili sebagai bentuk solusi untuk menutup aib tersebut agar martabat keluarga tidak tercoret dilingkungan masyarakat dan sebagai bentuk tanggung jawab juga atas perbuatan yang telah dilakukan.⁶⁷

Apabila umur dari calon pengantin lelaki maupun perempuan berumur 19 tahun keatas maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat namun apabila calon pengantin yang hamil di luar nikah tersebut masih berada di bawah umur 19 tahun, maka pihak pemohon yaitu orang tua atau wali dari anak tersebut harus meminta izin agar melakukan perkawinan melalui mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.⁶⁸

b. Ekonomi

Permasalahan perekonomian menjadi penyebab lahirnya perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah, banyak orang tua yang tidak berpikir panjang untuk keberlanjutan hidup

⁶⁷ Tim Penyusun, "*Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*," 2016, 1–128.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

anaknyanya untuk kedepannya, karena perekonomian kurang stabil sehingga banyak masyarakat berpikir menikah adalah salah satu bentuk solusi yang terbaik.⁶⁹ Opini masyarakat ini timbul karena rendahnya ekonomi hingga tidak dapat membiayai pendidikan anak maka solusi terbaik ialah menikahkan anaknya adalah salah satu bentuk menyerahkan tanggungjawab orangtua kepada suaminya dengan tujuan agar anaknya dapat hidup bahagia dengan suaminya.

Namun ada juga masyarakat merasa bahwa sudah bisa atau mampu untuk mempunyai penghasilan sendiri sehingga permasalahan ekonomi itu bisa ditutup karena sudah berpenghasilan sendiri seperti sudah punya bisnis sampingan, sudah kerja, atau nerusin bisnis orang tua, dengan demikian maka anak tersebut ingin menikah di usia dini saja agar dapat menghindari perbuatan zina tanpa berpikir panjang bahwa banyak tanggungjawab yang lahir setelah adanya pernikahan tersebut tidak hanya mengenai persoalan perekonomian.⁷⁰

c. Budaya/adat

Kebiasaan hukum dari masyarakat itu sendiri sejak dulu juga menjadi suatu hal bentuk budaya adat dalam masyarakat.

Dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁷⁰ *Ibid*

bahwa menikah kan anaknya di bawah umur 19 tahun dilarang atau bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Perkawinan dan juga banyak masyarakat yang berpendapat perkawinan anak ialah perbuatan yang wajar di dalam masyarakat.⁷¹

Hal ini terjadi karena masih kurang pengetahuan masyarakat terkait aturan hukum yang mengatur perkawinan dan juga karena banyak masyarakat juga menganggap telah sanggup dalam hal ekonomi dari segi keuangan maka menikah menuju suatu hal yang bahagia.

d. Menghindari Zina

Zina adalah suatu hubungan seksual antara lawan jenis yaitu lelaki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Pada Pasal 284 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menyatakan bahwa, zina merupakan persetubuhan dilakukan baik lelaki maupun perempuan yang sudah menikah dengan lawan jenis yang bukan suami atau istrinya, dan dilakukan atas dasar saling menyukai dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun.⁷²

Masih terdapat pemohon yang meminta permohonan dispensasi nikah dengan alasan untuk menghindari perbuatan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁷² R. Sugandhi, *K.U.H.P dengan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 300.

zina, seperti halnya banyak masyarakat dilingkungan tersebut telah mengetahui hubungan anak remaja yang lebih intens, karena untuk menghindari juga adanya suatu hal yang buruk yaitu perbuatan zina maka banyak sebagian orang tua menyarankan untuk menikah saja untuk menghindari perbuatan yang tercela yang dapat merusak nama baik keluarga.⁷³

Adanya empat alasan mendesak tersebut ialah menjadi penyebab lahirnya permohonan pengajuan dispensasi nikah. Dimana alasan mendesak tersebut termasuk problematika yang ada pada pihak pemohon sehingga pemohon mempunyai niat untuk meminta permohonan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama setempat dengan tujuan mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai bentuk solusi yang terbaik bagi anak pemohon tanpa berpikir keberlangsungan hidup dari anak tersebut apakah bahagia atau memberikan efek buruk dari diberikannya dispensasi nikah tersebut untuk anak karena kurangnya pemahaman terkait pernikahan di bawah umur bagi anak.

Sesuai yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Magetan, bahwa sebagian besar mayoritas masyarakat Magetan meminta permohonan dispensasi nikah untuk anak yang belum cukup umur di Pengadilan Agama Magetan dengan terdapat alasan yang mendesak yaitu hamil di luar nikah dan menghindari zina.⁷⁴ Agar memperoleh izin dispensasi nikah pemohon

⁷³ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁷⁴ *Ibid*

juga harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai bentuk dasar diterimanya pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut yang kemudian akan dilanjutkan dengan melalui persidangan yang sudah dijadwalkan dari pihak Pengadilan Agama Magetan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan

Masih terdapat sebagian besar masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan anak, telah jelas bahwa perkawinan anak sangat menyimpang pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 2019 pada batas minimum umur dalam melangsungkan perkawinan. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia terkait aturan hukum mengenai perkawinan sehingga menyebabkan adanya pengajuan dispensasi nikah yang menyebabkan lahirnya pernikahan di bawah umur tersebut yang menyebabkan suatu hal biasa dilingkungan masyarakat Indonesia, salah satunya di wilayah Kabupaten Magetan.⁷⁵

Pernikahan anak tersebut bisa berlangsung melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah sebagai salah satu bentuk upaya hukum agar dapat memperoleh izin untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur dengan adanya alasan yang mendesak. Berikut adalah hasil data dari Pengadilan Agama Magetan terkait jumlah data rekap perkara pengajuan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

permohonan dispensasi nikah yang ada di wilayah Kabupaten Magetan dari kurun waktu 2019 hingga 2023 yaitu seperti pada table dibawah ini:

Tabel.1.1 Data Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Terima Perkara	Putus		
			Dikabulkan	Tidak Diterima	Ditolak
1.	2019	70	70	0	0
2.	2020	168	161	3	0
3.	2021	121	116	3	5
4.	2022	107	104	1	2
5.	2023	94	94	0	0

Sumber data : Pengadilan Agama Magetan

Dari data uraian diatas, walaupun sudah terdapat lahirnya perubahan Undang – Undang Perkawinan pada batas umur melakukan pernikahan yang bertujuan agar dapat mengurangi pengajuan perkara dispensasi nikah namun masih terdapat adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah, salah satunya di Pengadilan Agama Magetan. Maka dengan demikian sangat jelas bahwa masih terdapat pengajuan perkara dispensasi nikah yang ada di wilayah Kabupaten Magetan.

Menurut Siti Marfu'ah selaku panitera di Pengadilan Agama Magetan, bahwa memang benar masih adanya pengajuan dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Magetan, bahkan pasca adanya perubahan batas usia minimal perkawinan terjadi lonjakan yang sangat signifikan, didukung dengan adanya Pandemi Covid-19 disebut sebagai salah satu faktor

pendongkrak banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah.⁷⁶ Walaupun demikian tidak semua dari pengajuan permohonan dispensasi nikah dengan mudahnya memperoleh izin atau dikabulkan permohonannya oleh hakim Pengadilan Agama Magetan karena majelis juga harus dengan cermat dan teliti dalam mempertimbangkan semua situasi dan kondisi serta fakta yang ada hingga hakim mengabulkan permohonan tersebut. Berdasarkan pada uraian tabel diatas, bahwa telah jelas mengenai pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan mengalami lonjakan pada tahun 2020. Lonjakan tersebut terjadi pada saat adanya pandemic Covid 19, Menurut Nurul Fauziyah Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, menyampaikan bahwa lonjakan dispensasi nikah dipengaruhi oleh perubahan ketentuan undang – undang terkait batas umur melangsungkan perkawinan yang awalnya batas minimal untuk melangsungkan pernikahan wanita 16 tahun, lelaki 19 tahun karena adanya perubahan tersebut menjadi baik perempuan maupun lelaki menjadi 19 tahun.⁷⁷ Sesuai dalam aturan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 2019, menyatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan pernikahan baik lelaki maupun perempuan berumur 19 tahun.

Adanya perubahan undang – undang tersebut menjadi penyebab adanya lonjakan perkara dispensasi nikah didukung juga kebanyakan pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan yaitu

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Siti Marfu'ah S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁷⁷ *Ibid.*

anak perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun dan disertai dengan adanya keadaan pandemic Covid 19 dimana banyak siswa melakukan kegiatan pembelajaran di rumah yang kebanyakan disebabkan tidak adanya pengawasan dari pihak orang tua juga sehingga anak bisa bebas melakukan perbuatan dengan bebas tanpa sepengetahuan orang tua yang menjerumuskan anak dalam pergaulan bebas dan seks bebas sehingga menimbulkan dampak negative bagi anak salah satunya mengakibatkan keadaan anak hamil diluar nikah. Adanya dampak tersebut yang menjadi problematika masyarakat sebagai pihak pemohon sehingga mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan tujuan untuk menyelesaikan problematika tersebut melalui perolehan izin melangsungkan pernikahan anak melalui permohonan dispensasi nikah dengan alasan mendesak di Pengadilan Agama Magetan.

Menurut Nurul Fauziyah selaku hakim Pengadilan Agama Magetan, berpendapat adanya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan era tahun 2020 menjadikan sebuah himbauan atau peringatan kembali bagi hakim Pengadilan Agama Magetan untuk lebih tegas, bijaksana dan lebih mendetail lagi dalam menyikapi hingga menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah tetap berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan didukung juga adanya aturan ketentuan kaidah – kaidah syariat dalam hukum islam dengan tujuan tetap untuk kepentingan terbaik bagi anak dan juga untuk mengurangi

adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan.⁷⁸

Sehingga memberikan dampak baik juga bagi hakim Pengadilan Agama Magetan yangmana terdapat adanya penurunan angka pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan di setiap tahunnya hingga sekarang. Dengan demikian hakim Pengadilan Agama Magetan telah membuktikan bahwa lonjakan pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan yang sangat signifikan pada tahun 2020 dengan berjumlah adanya 168 pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah kini pada tahunnya menurun seperti tahun 2021 menjadi 121, tahun 2022 adanya 107 dan tahun 2023 hanya ada 94 perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan. Hal tersebut dapat dibuktikan juga dalam bentuk persentase terkait peningkatan dan penurunan data pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Persentase Data Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan tahun 2019 – 2023

No	Terima Perkara		Kenaikan / Penurunan pengajuan Dispensasi Nikah
	Tahun		
1.	2019	2020	140%
	70	168	

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Siti Marfu'ah S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Magetan, Jum'at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

2.	2020	2021	-28%
	168	121	
3.	2021	2022	-12%
	121	107	
4.	2022	2023	-12%
	107	94	

Pada tabel di atas telah jelas, bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan yang awalnya melonjak tinggi sekarang telah mengalami perubahan dengan adanya penurunan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan yang semakin menurun dari kurun waktu 3 tahun. hal tersebut telah membuktikan bahwa perubahan hakim yang lebih bijak, tegas, dan mendetail dalam menyikapi hingga proses menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan memberikan dampak yang baik dengan adanya penurunan pengajuan perkara dispensasi nikah pada setiap tahunnya.

Dalam diberikannya izin permohonan dispensasi nikah, hakim memiliki landasan dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, adanya pemberlakuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 2019 ialah dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Bahwa dengan adanya peningkatan mengenai batas usia minimal

untuk melangsungkan pernikahan wanita 16 tahun menjadi 19 tahun dengan tujuan untuk menurunkan jumlah perkawinan anak di masyarakat Indonesia, namun pada faktanya di masyarakat dengan adanya perubahan batas umur melakukan pernikahan, tidak menurunkan jumlah pernikahan di bawah anak tetapi menjadi bertambah pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan apalagi pada tahun 2020.⁷⁹

Untuk membantu menekan adanya pernikahan anak di wilayah Indonesia salah satunya wilayah Magetan, maka dengan adanya Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diharapkan untuk menekan perkawinan anak dengan adanya putusan permohonan dispensasi nikah, pendapat Nurul Fauziyah selaku hakim Pengadilan Agama Magetan, dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim berlandaskan dengan berbagai alasan dan sudut pandang yaitu sebagai berikut :⁸⁰

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Al – Qur’an, Hadis serta kitab terdahulu

Adanya penegakan hukum bermulai dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk menggapai kedamaian, kesejahteraan dan keamanan di dalam masyarakat yang memiliki berbagai penyampaian tertentu juga terkait hukum.⁸¹ Dalam memutus perkara

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum’at, 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

dispensasi nikah tidak hanya meninjau pada sumber hukum yaitu Undang – Undang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Al – Qur’an dan hadits saja, namun juga hakim menitikberatkan pada sumber kontekstual oleh pemohon, seperti penyebab adanya kehamilan di luar nikah, ekonomi, maupun kultur budaya. Sumber hukum yang dijadikan landasan pertimbangan awal para hakim yaitu UU Perkawinan Tahun 1974, menyampaikan pernikahan merupakan sebuah hubungan lahir dan batin sepasang suami istri yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membahas mengenai dispensasi nikah terkait batas usia pernikahan, yang sudah tercantun dalam Undang – Undang Perkawinan, calon pengantin wajib siap jiwa raganya agar untuk bisa mencapai impian dalam pernikahan sebaik mungkin tidak adanya perceraian serta memperoleh penerus yang diharapkan sehingga perlu pencegahan pernikahan masih dibawah umur.⁸²

Adanya ketentuan terbaru yakni Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengenai peningkatan batas umur wanita yang semula 16 tahun berubah 19 tahun, membuat hakim juga merasa khawatir serta hal tersebut sebuah himbauan lagi bagi mereka dalam melaksanakan

⁸² Erma Fatmawati and others, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember* (Pustaka Ilmu, 2020).

ketentuan tersebut. Meninjau kembali perkara sebelum diubah mengenai batas usia minimal calon mempelai pun sudah banyak masyarakat mengajukan permohonan dispensasi nikah, pada data di Pengadilan Agama Magetan sesudah munculnya penambahan batas umur nikah, perkara dispensasi nikah tidak ada penurunan tetapi sebaliknya data yang masuk di Pengadilan Agama Magetan terkait permohonan dispensasi nikah diterima oleh hakim dan hampir tidak ada yang ditolak.

Untuk memutuskan perkara ini hakim juga berpatokan dan berpedoman pada aturan UU Perkawinan Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 2019, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi hakim juga melihat beberapa aspek lain sesuai pada Pasal 1 ayat (1), (5) dan (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa :⁸³

- a. Dispensasi nikah merupakan sebuah izin kawin yang diberikan Pengadilan kepada calon mempelai suami maupun istri yang mencapai batas usia, telah disampaikan oleh UU Perkawinan Tahun 2019 yaitu berusia 19 tahun untuk melakukan pernikahan

⁸³ Pasal 1 ayat (1), (5), dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- b. Kepentingan terbaik untuk anak merupakan suatu perbuatan perlu diketahui agar memberi kesejahteraan, kelangsungan hidup anak.

Membahas hal di atas, menurut Nurul Fauziyah selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Magetan, mengatakan para hakim tetap memperhatikan ketentuan hukum mengenai batas umur minimum 19 tahun untuk calon pengantin perempuan dan lelaki, namun perlu diingat dan diketahui kembali bahwa pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga harus memikirkan serta memperhatikan kepentingan terbaik anak serta kepentingan seseorang mendaftarkan dispensasi nikah, dengan sebagian besar berada dalam keadaan darurat sehingga sangat perlu untuk segera menikah.⁸⁴

Tidak hanya itu juga bahwa dalam ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak dicantumkan mengenai berbagai bagian dibutuhkan untuk dijadikan landasan pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak permohonan dispensasi nikah, dalam ketentuan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 kebanyakan hanya menyebutkan mengenai administrasi dalam mengajukan dispensasi nikah saja tidak terdapat adanya ketentuan yang secara tegas yang

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

menjelaskan terkait beberapa bagian mengenai hakim yang wajib menolak maupun menerima permohonan dispensasi nikah.

Menurut Nurul Fauziyah selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, menegaskan kembali sebenarnya hakim sudah melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, namun hakim juga belum dapat menyeluruh mengetahui secara dalam keterangan dari para pihak dikarenakan yang diterima yaitu mengenai pernyataan di muka sidang, apabila di muka sidang, apabila di dalam persidangan seluruh saksi setuju hingga menjabarkan telah bisa melangsungkan pernikahan serta menjalankan rumah tangga, sehingga disetujui oleh hakim.⁸⁵

Sebab PERMA No.5 Tahun 2019 hanya menyebutkan syarat beserta ketentuannya saja sertai mengenai keputusan untuk menolak maupun menerima berada pada hakim. Dalam memutuskan permohonan tersebut hakim juga berlandaskan aturan islam seperti Al -Qur'an sunnah dan kitab lainnya, agama memang tidak mengharamkan atau menentang adanya perkawinan anak serta tanpa adanya perbuatan buruk mengenai pernikahan dibawah usia.

Menurut Nurul Fauziyah selaku hakim Pengadilan Agama Magetan, bahwa sesuai pandangan Islam, menikah merupakan bentuk fitrah manusia yang sangatlah disarankan untuk umat islam

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

sebab pernikahan adalah suatu bentuk naluri kemanusiaan yang perlu dicukupi dengan langkah yang baik dan sah supaya tidak terjerumuskan kepada perzinaan.⁸⁶ Manusia menikah juga memiliki tujuan untuk hidup bersama selamanya dengan membentuk keturunan serta keluarga yang bahagia berdasarkan syariat pedoman agama dan kepercayaan yang dianut. Islam tidak menjelaskan secara detail terkait batas umur untuk melakukan pernikahan sebab, sudut pandang islam perkawinan akan sah bila sudah terpenuhinya persyaratan dan rukun dalam perkawinan, namun dalam hal ini berbeda dengan para ulama mengenai perkara ini karena terdapat adanya faktor kedewasaan atau umur yang sesuatu hal penting.

Meninjau hal tersebut menurut pendapat Nurul Fauziyah, telah menjelaskan secara jelas bahwa kajian mengenai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan pada Al-Qur'an hakim belum menjelaskan dengan rinci.⁸⁷ Para hakim menyampaikan apabila meninjau kembali dari agama tidak adanya pantangan asalkan calon mempelai telah baligh, sehingga hakim menyampaikan terhadap beberapa pertimbangan memutuskan perkara dispensasi nikah tersebut yangmana hakim harus melihat dari maslahat atau sesuatu yang membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi kepentingan anak dari apa yang diputuskan dan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁸⁷ *Ibid.*

menghindari mudharat atau dampak buruk yang kemungkinan dapat terjadi bagi anak setelah keputusan tersebut.⁸⁸

Maka dengan demikian apabila melihat dari sumber hukum yaitu UU Perkawinan Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta Al-Qur'an hadist beserta kitab lainnya mengenai alasan hakim menyetujui permohonan dispensasi nikah yaitu masih bimbang serta tidak tegas. Menurut Nurul Fauziyah selaku hakim Pengadilan Agama Magetan, menyampaikan, dalam menerima pengajuan permohonan dispensasi nikah pihak pemohon perlu juga diketahui bahwa pasti timbul adanya kemungkinan ada berbagai mudharat lebih besar dari pada maslahat yang didapatkan pihak calon pengantin hendak melakukan pernikahan tidak hanya itu saja kemungkinan terjadi juga untuk keluarga kecilnya.⁸⁹

2. Faktor Kontekstual

Menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah hakim Pengadilan Agama Magetan juga harus berlandaskan faktor kontekstual yang berhubungan dengan pihak pemohon dalam perkara ini. Faktor kontekstual merupakan suatu bentuk aspek landasan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah dengan melihat dari latar belakang terjadinya problematika yang dialami pemohon tersebut baik dari segi aspek sosial dan budaya hukum pemohon.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁸⁹ *Ibid.*

Terdapat Adanya 2 faktor kontekstual yang dimaksud yaitu seperti berikut :⁹⁰

a. Faktor Budaya tradisi dan Norma dalam masyarakat

Faktor ini juga sering terjadi pada saat pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan. Sudut pandang budaya atau tradisi dalam masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa perkawinan anak ialah suatu perbuatan yang lazim. Seperti adanya kepercayaan masyarakat akan suatu hal bahwa “seorang anak wanita yang dilamar wajib diterima, dan apabila ditolak maka dapat mengakibatkan tidak dapat jodoh lagi”.

Banyak masyarakat berpendapat anak yang mau menikah wajib sama dengan weton atau tanggal perhitungan jawa dengan adanya hal tersebut membuat masyarakat masih mempercayai mengenai hitungan kelahiran jawa (weton) hingga saat ini. Hal ini mengakibatkan kewajiban dari pihak keluarga untuk menikah saat itu juga. Faktor ini dianggap karya, cipta, rasa berlandaskan karsa, budaya ini menyatu dengan faktor masyarakat namun sengaja dibedakan sebab pada inti pembahasannya pada persoalan nilai – nilai menjadikan pokok budaya spiritual.⁹¹

Norma agama juga menjadi salah satu budaya Indonesia yang dipercayai serta menjadi sebuah alasan utama untuk

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁹¹ A.A.A Peter dan Koesriani Siswosebroto, 1988, *Hukum Dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Sinar Harapan, Jakarta.

melangsungkan perkawinan. Agama tidak melarang adanya perkawinan dibawah usia serta tanpa adanya kriminalisasi perkawinan dibawah usia. Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai sudut pandang islam terkait agama dimana menikah adalah sebuah fitrah manusia yang sangat disarankan untuk umat Islam oleh sebab itu menikah ialah naluri kemanusiaan yang wajib terpenuhi dengan sah dengan tujuan untuk tidak terjerumus pada hubungan zina.

b. Faktor rendahnya pendidikan serta ekonomi

Pendapat Nurul Fauziyah selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, kedua faktor ini sangatlah bersinambungan karena apabila ekonomi dikira masih rendah sehingga tidak melanjutkan pendidikan dan berujung adanya tekanan agar menikah saja, tekanan segera menikah sudah dianggap suatu kelaziman masyarakat yang condong terhadap perkawinan di bawah umur.⁹² Hal ini disebabkan faktor Pendidikan, perekonomian dari masyarakat dalam hal ini masyarakat belum paham dan mengetahui terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya pernikahan anak pada bentuk aspek kesehatan dan psikologis dari para pihak.

⁹² Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

Banyak masyarakat yang masih beranggapan perkawinan akan mengangkat persoalan ekonomi yang dilalui menjadi mudah dan beranggapan setelah menikah rezeki itu pasti datang dari manapun apalagi nanti kalau sudah punya anak rezeki itu pasti ada namun pada kenyataannya dapat juga kemungkinan berujung sebaliknya karena perkawinan masih dibawah umur sehingga dapat menimbulkan kemungkinan hal buruk terjadi tidak sesuai harapan seperti pekerjaan yang belum tetap, kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah, belum adanya kesiapan secara matang untuk menikah dan berumah tangga serta lainnya.⁹³

Adanya hal tersebut menjadi faktor penghambat akan kesadaran hukum yaitu mengenai pendidikan, tanggung jawab, pola berpikir dan ekonomi masyarakat yang rendah. Sehingga dibutuhkan adanya dua hal untuk mengkaji efektivitas hukum yaitu dengan mengukur ketaatan hukum secara umum hingga meninjau beberapa faktor yang mempengaruhinya serta meninjau terkait dengan ketaatan terhadap sebuah aturan hukum tertentu maupun khusus dan juga beberapa faktor yang mempengaruhinya.⁹⁴

Pernikahan di bawah umur yang rentan atau muda juga salah satu bentuk waspada dari pihak orang tua agar menghindari

⁹³ Hasil Wawancara dengan Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

⁹⁴ IRMA IDRIS, "*MENINJAU HUBUNGAN TEORI KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM DENGAN EARLY-AGE MARRIAGE,*" n.d.

timbulnya beberapa dampak buruk merusak martabat keluarga. Hingga banyak masyarakat salah satunya masyarakat di Kabupaten Magetan yang meyakini bahwa menikah merupakan niat baik dalam suatu ibadah maka akan timbul baik dan menambah rezeki juga dikedepannya.

Melihat adanya pendapat masyarakat ini dapat dilihat bahwa budaya tradisi, norma agama juga berpengaruh dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan. Adanya beberapa faktor sumber hukum kontekstual yang melatar belakangi baik dari aspek sosial maupun budaya yang dialami oleh pihak pemohon diatas ialah menjadi sebuah landasan dasar pertimbangan yang kokoh dari para hakim Pengadilan Agama Magetan mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

penjelasan sebelumnya, penulis menyimpulkan alasan hakim menerima permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan disebabkan dari pertimbangan sumber hukum seperti ketentuan Undang – Undang dan faktor kontekstual, para hakim lebih mengedepankan kepentingan terbaik anak serta alasan hakim menerima disebabkan khawatir bila ditolak dapat mengakibatkan mudharat atau sesuatu membahayakan yang muncul lebih besar terhadap anak tiada instansi bisa menanggung apabila ditolak anak tidak melakukan perbuatan tercela, sehingga hakim setuju menerima permohonan dispensasi nikah dengan persyaratan

administrasi yang lengkap, orang tua dan anak saling menyetujui, orang tua ikut membantu serta membimbing anak terkait perkara rumah tangga agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak seperti yang telah dibicarakan didalam persidangan, serta didukung dengan adanya bukti – bukti terlampir yang lengkap.

Walaupun dengan demikian hakim Pengadilan Agama Magetan menyatakan, bahwa masih banyak sebagian masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Magetan, sebagian besar masyarakat disana menganggap bahwa melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah masyarakat tetap bisa melangsungkan pernikahan di bawah umur sehingga dapat menyelesaikan problematika yang dialaminya dan akan berakhir bahagia untuk kedua mempelai yang akan hendak melangsungkan pernikahan tersebut.⁹⁵ Sebagian besar masyarakat Magetan belum mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum negara serta juga sebagian masyarakat Magetan masih beranggapan bahwa menikah dibawah umur merupakan hal yang sangat wajar yang mereka ketahui hanya cuman terkait umur saja yang lebih muda tanpa memikirkan kemungkinan timbulnya dampak buruk yang terjadi bagi anak karena telah memutuskan untuk menikah lebih awal dengan usia yang belum dewasa. Namun menurut penulis hal ini sangatlah berbeda terdapat beberapa resiko yang kemungkinan dapat terjadi pada anak yang sudah

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan, Jum'at 19 April 2024, Pukul 08.00 WIB, di Pengadilan Agama Magetan

berumah tangga dengan adanya perkawinan anak sudah ada di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Magetan.

Beberapa faktor resiko pernikahan di bawah umur kemungkinan ada dampak buruk yaitu sebagai berikut :

1. Dampak Ekonomi

Sebagian besar pernikahan di bawah umur sering menyebabkan munculnya keadaan kemiskinan ekonomi pada keluarga baru terutama pada pernikahan anak karena sebagian masyarakat Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur masih anak remaja belum dewasa dan belum mempunyai pekerjaan mapan dan layak serta rendah nya pendidikan karena sebagian besar masyarakat Indonesia yang melangsungkan pernikahan di bawah umur pasti tidak melanjutkan pendidikannya sebagai layaknya kewajiban dan hak anak dibawah umur untuk belajar dan memperoleh ilmu.

Adanya hal tersebut menyebabkan banyak anak yang sudah berumah tangga masih menjadi tanggung jawab keluarganya terutama orang tua dari pihak lelaki (suami) sehingga orang tua jugalah yang akan membantu dan menopang kebutuhan hidup keluarga kecil anaknya untuk memberi nafkah keluarga mereka juga mencukupi keluarga baru anaknya kecuali jika pasangan lelaki atau perempuan lebih cukup sehingga memiliki profesi dan penghasilan masih cukup untuk mencukupi keluarga barunya tersebut.

2. Dampak Sosial

Meninjau dari segi sosial, pernikahan anak dibawah umur karena masih mempertahankan ego pada dirinya masing – masing sehingga memberikan dampak yang menimbulkan perceraian di usia dini dan umur masih muda selain itu masih banyak terjadi perselingkuhan pasangan muda yang baru nikah. Hal tersebut terjadi karena emosi dari kedua pasangan muda yang berumah tangga masih belum stabil sehingga sering menimbulkan adanya pertengkaran yang berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya itu saja bisa hingga kekerasan mental hingga seksual yang terjadi karena hubungan rumah tangga yang tidak seimbang dan belum memiliki kesiapan yang matang dalam berumah tangga.

3. Dampak Kesehatan Reproduksi Anak

Banyak anak muda yang masih kurang paham terkait kesehatan reproduksinya sendiri apalagi anak dibawah umur yang sudah melangsungkan pernikahan pasti masih kurangnya pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Perkawinan di bawah umur dengan usia yang masih muda siap maupun tidak harus tetap siap untuk melahirkan dan merawat anak sehingga sangat rentan beresiko untuk kesehatan reproduksinya dan apabila terjadi hamil di luar nikah sebagian besar anak masih enggan dan takut untuk

bercerita kepada orang tua nya pada akhirnya cenderung menutupi kehamilannya.

Dengan adanya hal demikian sehingga membuat janin dalam kandungan rentan tidak memperoleh gizi,dan protein dari ibunya dengan baik ditambah lagi karena menyembunyikan kandungannya maka tidak memperoleh layanan perawatan kesehatan kehamilan pada kandungannya yang memadai bagi ibu maupun janin yang ada dalam kandungan. Banyak sebagian anak muda menganggap bahwa karena memiliki pergaulan bebas sehingga mempunyai pemikiran bahwa melakukan hubungan seksual di usia muda dianggap sangatlah lazim dengan alasan karena saling mencintai itu adalah salah satu perbuatan yang dapat menjerumuskan anak kearah yang buruk.

4. Dampak Psikologis

Pernikahan anak dibawah umur juga menyebabkan timbulnya dampak psikologis anak karena dalam berumah tangga pasangan di bawah umur masih belum siap secara mental untuk menghadapi kehidupan selanjutnya dalam berumah tangga dan untuk menghadapi permasalahan yang datang dalam berumah tangga sehingga timbul adanya penyesalan karena menikah di usia muda karena kehilangan masa sekolah dan remajanya.

Karena masih muda dan secara emosi juga belum stabil perkawinan di bawah umur sering menimbulkan pertengkaran untuk

mempertahan ego serta pendiriannya masing – masing dari setiap pasangan sehingga emosi yang tidak terbandung sehingga terjadi kekerasan fisik maupun mental yang menyebabkan trauma yang dialami oleh pasangan tersebut salah satunya yang sering mengalami trauma berat yaitu perempuan dalam perkawinan.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA